

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul.**

Nahdlatul Ulama (NU) selama ini dapat dipahami sebagai jam'iyah atau gerakan sosial yang sulit dipisahkan dari dinamika politik nasional maupun internasional. Organisasi dengan basis komunitas santri terbesar tersebut yang menyebabkan aktivitasnya seringkali terlibat didalam kegiatan politik baik itu politik secara nasional juga secara tidak langsung terlibat dalam politik internasional. Tujuan kenegaraan yang ada di Nahdlatul Ulama hingga partai politik hampir tidak mungkin mengabaikan kekuatan dan Jam'iyah ini. Dinamika Nahdlatul Ulama (NU) seperti sebuah perahu yang mendayung di antara dua pulau, yaitu sebagai gerakan sosial dan aura politik yang melekat padanya.

Hubungan kegiatan sosial dan kegiatan politik (*kekuasaan atau kenegaraan*) berkelit dan sedemikian dalam sistem hukum Islam (*Syari'ah atau fiqih*). Disinilah mengapa persoalan sosial hampir selalu bermuara pada persoalan politik, dan sebagainya. Hal ini dengan mudah kita lihat dalam politik nasional maupun internasional. Yang melibatkan gerakan Islam dan Nahdlatul Ulama (NU), khususnya dalam kasus kepemimpinan nasional

yaitu Abdurahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat.

Mungkin banyak orang yang mengira Nahdlatul Ulama (NU) hanya sebuah organisasi sosial yang sama sekali tidak memiliki kepedulian terhadap urusan internasional, karena tidak memiliki akses internasional. Memang Nahdlatul Ulama (NU) sangat hormat terhadap warisan tradisi dan nilai-nilai lokal sehingga Nahdlatul Ulama (NU) bisa diterima dimasyarakat nusantara manapun dan tidak pernah konflik dengannya. Namun demikian Nahdlatul Ulama (NU) bukan berarti tidak peduli pada urusan internasional, secara historis terbukti bahwa Nahdlatul Ulama (NU) lahir sebagai respon atas pemberlakuan azas tunggal Wahabi di Masjidil Haram, sebagai kota suci seluruh umat Islam, Nahdlatul Ulama (NU) dengan komite Hejaz nya mengajukan resolusi pada Raja Abdel Aziz agar diberlakukan kebebasan bermazhab. Dengan berbagai pertimbangan usul tersebut akhirnya dapat diterima, yang kemudian akhirnya terciptalah kedamaian dan keharmonisan kehidupan beragama di kota Internasional itu hingga sekarang. Itulah peranan awal yang pernah diperoleh Nahdlatul Ulama (NU) dalam sejarah dunia. Dan banyak hal lagi yang dilakukan Nahdlatul Ulama (NU) dalam perannya sebagai aktor negara, seperti perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh negara-negara Islam di tahun 1940-hingga 1980-an. Karena itu Nahdlatul Ulama (NU) memilih jagat sebagai simbol, artinya dari simbol tersebut dapat dijelaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) peduli terhadap urusan kesejagatan

berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan Negara-negara Islam di tahun 1940- hingga 1980-an<sup>1</sup>.

Di tengah masyarakat Islam internasional yang dihadapi berbagai masalah, seperti keterbelekangan dan dipojokkan ke dalam berbagai stigma dunia, maka Nahdlatul Ulama (NU) kembali terpanggil untuk menyelamatkan Islam dunia, dengan membawa cara pandang dan sikap baru dalam mengamalkan Islam. Melalui konferensi Intelektual Islam internasional tersebut, Nahdlatul Ulama (NU) berusaha mengatasi problema-problema yang dihadapi umat Islam dewasa ini dengan mengetengahkan prinsip-prinsip dasar yang selama ini telah dijalankan Nahdlatul Ulama (NU) dan beberapa bagian umat Islam di Negara lain.

Pada tahun 1980-an sampai 1990-an, Nahdlatul Ulama (NU) terus menangani isu-isu internasional yang sering muncul, melalui keterlibatannya dalam berbagai lembaga di tingkat dunia untuk menciptakan kedamaian dan keadilan umat sedunia. Dunia mengakui peran Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan yang populis moderat dan toleran itu merupakan citra ideal yang perlu ditampilkan di dunia moderen yang plural, yang menghargai kesetaraan, kebebasan dan keadilan. Karena hanya dengan prinsip tersebut dunia yang damai dan sejahtera bisa diciptakan, harapan dunia itu tidak disia-siakan oleh Nahdlatul Ulama (NU). Sehingga permasalahan suatu negara nyatanya tidak harus pemerintahan yang langsung menanganinya, kenyataan

terhadap negaranya. Keterlibatan suatu organisasi di suatu negara dalam kegiatan internasional merupakan usaha menjalin hubungan baik antar negara. Dengan adanya suatu organisasi yang bersifat internasional ini tentu akan dapat membawa negara tersebut menjalin hubungan yang baik terhadap negara lain.

Mendasari fenomena diatas maka muncul inspirasi penulis untuk mengangkat fenomena tersebut sebagai judul skripsi :

***“Nadhlatul Ulama (NU) Sebagai Aktor Trans-National”***

## **B. Tujuan Penelitian.**

Sebuah penelitian ilmiah pada umumnya bertujuan untuk memberikan gambaran yang obyektif mengenai suatu fenomena tertentu. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan penulis ini.

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dalam bangku kuliah dengan menerapkan metodologi yang sesuai dengan ilmu Hubungan Internasional dalam sebuah penelitian.
2. Menjelaskan eksistensi Nadhlatul Ulama sebagai gerakan yang tidak terbatas pada sosial, agama dan politik serta ekonomi, tetapi dapat juga berperan sebagai aktor trans-nasional.
3. Memberikan sumbangan pengetahuan yang berharga sebagai sarana

### C. Latar Belakang Masalah.

Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk ikut serta ambil peran dalam usaha bersama bangsa kita untuk mewujudkan masyarakat berperadaban, masyarakat madani, civil society, di negara kita tercinta. Adalah Nabi Muhammad Rasulullah sendiri yang memberi teladan kepada umat manusia kearah pembentukan masyarakat peradaban. Setelah belasan tahun berjuang di kota Mekkah tanpa hasil yang terlalu mengembirakan, Allah memberikan petunjuk untuk hijrah ke Yastrib, kota wahah atau oase yang subur sekitar 400 Km sebelah utara Mekkah. Sesampai di Yastrib, setelah perjalanan berhari-hari yang amat melelahkan dan penuh kerahasiaan, Nabi disambut oleh penduduk kota itu dan para gadisnya menyanyikan lagu *Thala'a al-badru 'alaina* (*Bulan Purnama telah menyingsing diatas kita*), untaian syair dan lagu yang kelak menjadi amat terkenal di seluruh dunia. Kemudian setelah mampan dalam kota hijrah itu, Nabi mengubah nama Yastrib menjadi *al-Madinat al-naby* (Kota Nabi).

Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia akibat penjajahan yang cukup lama maupun akibat kungkungan tradisi yang tidak mau berkembang telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini melalui jalan pendidikan dan organisasi.

Belakangan ini keterlibatan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Dunia Internasional semakin meningkat, berbagai permasalahan dunia seperti

lainnya menyebabkan Nahdlatul Ulama (NU) tidak bisa tinggal diam melihat kondisi ini. Nilai-nilai yang dimiliki Nahdlatul Ulama (NU) seperti toleransi dan modernisasi telah terbukti dapat menjadi senjata ampuh untuk ikut mengambil bagian mengurangi ketegangan berbagai konflik dan kekerasan menggunakan simbol agama terjadi di berbagai wilayah dan kawasan dunia.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi masyarakat keagamaan terbesar di Indonesia, mempunyai kekuatan sejarah yang maha dahsyat dalam pemberdayaan bangsa. Keberadaannya sebagai komunitas muslim yang secara budaya sangat mengakar di bumi nusantara ini dengan kuantitasnya yang diklaim banyak dan memang nyata cukup banyak, serta budaya komunitasnya yang menunjukkan watak komunitas tradisional dengan pola hubungan kiai/santri/masyarakat yang patro-klien, menjadikan banyak kepentingan politik di tingkat negara yang berambisi untuk mendekati dan mengarapnya sebagai komoditas politiknya.

Dalam era globalisasi sekarang ini peran INGOS (*International Non Government State Organitations*) atau organisasi internasional non Pemerintah / negara, mempunyai peranan yang sangat kuat sebagai lembaga kontrol Pemerintah lokal dan internasional. Nahdlatul Ulama (NU) di era globalisasi sekarang ini terus mengakar bukan hanya di Indonesia namun di negara lain antara lain Arab Saudi, Mesir, Sudan, Syria, Yaman, Irak, Maroko dan Inggris melalui keberadaan pengurus cabang istimewa (PCI).

Dialektika dinamis Nahdlatul Ulama (NU) dalam konsentrasi

bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama (NU) yang mendeklarasikan dirinya sebagai penganut ajaran Sunni<sup>2</sup>, sudah barang tentu sangat terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran keagamaan Sunni<sup>3</sup>.

Sejarah keberadaan Nahdlatul Ulama (NU) setelah Indonesia merdeka, memang tidak bisa dipisahkan dengan orientasi dan kegiatan politik praktis. Setelah bergabung dengan partai Masyumi sejak tahun 1945, maka melalui muktamarnya di Palembang tahun 1952 para tokohnya memutuskan untuk mendirikan partai politik (Parpol) sendiri yang bernama Partai Nahdlatul Ulama (NU) dan menjadi salah satu peserta pemilu pada tahun 1955. Sejak saat itu Nahdlatul Ulama (NU) menjadi dua kekuatan yang berjalan bersamaan, yakni sebagai organisasi sosial keagamaan dan sebagai parpol.

Realitas Nahdlatul Ulama (NU) tidaklah bersifat statis, ia mengalami proses perubahan yang dinamis seiring dengan meningkatnya mobilitas para warganya. Realitas itu juga tidak bersifat homogen atau tidak sehomogen beberapa tahun lalu. Apa yang terjadi pada tahun 1988 hingga kini memberi pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan sosial bangsa Indonesia, termasuk Nahdlatul Ulama (NU), dimana didalamnya terjadi pergeseran-pergeseran orientasi politik warganya. Hal itu juga merupakan perubahan persepsi terhadap realitas Nahdlatul Ulama (NU) di dalam diri sebagian warganya setelah melihat bahwa yang mereka alami bebrbeda dengan realitas Nahdlatul Ulama (NU) yang selama ini dipunyai.

---

<sup>2</sup> PB Nahdlatul Ulama, Hasil-hasil muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama, Lajnah Ta'lif Wa al-Nashr PB NU, Jakarta, 1996, hal.9

<sup>3</sup> Greg Frealy and Greg Barton, Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama, ali

Dengan demikian apa yang dilakukan Nahdlatul Ulama (NU) hingga saat ini, yakni melakukan perhelatan internasional bukanlah hal baru, yang mengada-ada, apalagi meniru-niru, melainkan sebagai lanjutan dari usaha yang telah dirintis para pendiri Nahdlatul Ulama (NU), para penerus serta generasi yang saat ini.

#### **D. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dengan mengingat keterkaitannya dengan judul proposal skripsi ini, maka permasalahannya yang penulis ajukan adalah ***“Bagaimana Langkah-langkah Nahdlatul Ulama (NU) Sehingga Mampu Berperan Sebagai Aktor Trans-National ?”***

#### **E. Kerangka Dasar Pemikiran.**

Barangkali, unsur yang terpenting dalam suatu penelitian adalah teori, karena dengan unsur ilmu inilah penulis mencoba menerangkan fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya. Teori adalah serangkaian fenomena sosial, secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep<sup>4</sup>.

Menurut definisi ini teori mengandung tiga hal. *Pertama*, teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan dengan cara menentukan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungan. *Kedua*, teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara

---

<sup>4</sup> Adaptasi dari Kerlinger, FN, *Foundation of Behavioral Research 2 nd*, Editin, Holf, Rinchart



menentukan hubungan antar konsep. *Ketiga*, teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana hubungannya.

Dalam perumusan masalah di atas, maka penulis ingin menggunakan suatu rumusan masalah dengan teori Transnasional<sup>5</sup>. Pada dasarnya tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional. Perilaku tersebut dapat berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan lain sebagainya. Walaupun kenyataannya, aktor yang paling efektif adalah negara, harus diperhatikan juga perilaku aktor-aktor non-negara<sup>6</sup>. Sistem internasional masa kini, terutama dengan adanya teknologi transportasi dan komunikasi modern serta tingkat ketergantungan ekonomi yang tinggi. Beberapa faktor termasuk aktor-aktor non negara mampu membuat dan membentuk jaringan kerjasama secara relatif bebas, sedangkan beberapa yang lain termasuk beberapa negara bangsa tertentu, tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk membuat keputusan secara bebas.

Menggunakan suatu formulasi permasalahan dengan model Transnasional untuk menjelaskan permasalahan di atas. Seharusnya suatu aktor dalam politik global tidak didefinisikan berdasarkan kualitas kedaulatan atau karakteristik wilayah. Apakah sesuatu itu aktor politik atau bukan seharusnya didefinisikan berdasarkan atribut behavioral yang disebut otonomi. Otonomi

---

<sup>5</sup> Mohtar Ma' oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Edisi Revisi, September 1994, LP3ES, Jakarta, hal.230

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 28

adalah kemampuan para pemimpin suatu unit organisasi untuk melakukan tindakan yang tidak ditentukan oleh aktor lain dan wewenang lain<sup>7</sup>.

Agar bisa berperilaku otonom suatu aktor harus memiliki kemampuan untuk mencari dan menerima informasi, memprosesnya dan akhirnya memberi kemampuan membuat keputusan. Dalam proses pembuatan keputusan, aktor itu mengkonversikan informasi masa lalu dan sekarang serta menggariskan haluan yang oleh para pembuat keputusan itu dipandang bisa memenuhi kepentingan mereka atau kepentingan organisasi yang diwakilinya.

Kita menyadari bahwa kita tertarik pada unit-unit politik yang melakukan hubungan internasional itu, karena kemampuan mereka membuat keputusan dan menerapkan kebijakn (*policy*) yang dapat mempengaruhi pihak lain. Meskipun aktor-aktor tersebut adalah aktor non-negara yang tidak memiliki kedaulatan. Banyak diantaranya yang relatif bebas dan dapat mempengaruhi orang lain, kalaupun dibatasi oleh beberapa wilayah suatu negara di Dunia.

Dengan demikian, asumsi pokok ini adalah berkurangnya peranan negara sebagian aktor dalam politik dunia dan meningkatkan peranan aktor non-negara pendukung pandangan ini, disebutkan misalnya Robert O. Kohane, Joseph S Nye, Jr. Richard Mansbach dan Raymond Hopkins dan lain-lainnya, yakin bahwa batas-batas yang memisahkan hati aktor-aktor lain, baik sesama bangsa ataupun non-negara. Bagi beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah geografi tidak perlu diperdulikan. Para observer

---

<sup>7</sup> Mochtar Mas'ood, *Teori dan Metodologi Hubungan Internasional*. Penerbit PAU Sosial-Politik UGM, Yogyakarta. 1993. ha.209

berpendapat bahwa andaikan pemerintah tetap memandang dunia dengan menggunkan citra kuno (*misalnya negara bangsa aktor yang berdaulat, berperilaku bebas dan memiliki kekuatan militer*). Pandangan itu bisa menuntutnya kearah pembuatan kebijaksanaan yang salah dan tidak semestinya, bahkan bisa membahayakan kehidupan manusia.

Mereka ini mengajukan usulan model untuk mendeskripsikan dunia dalam makna hubungan internasional bukan hubungan internasional. Transnasiona diartikan oleh Richard Falk sebagai perpindahan barang, informasi, dan gagasan melintas batas wilayah nasional tanpa partisipasi atau dikendalikan secara langsung oleh aktor-aktor pemerintah<sup>8</sup>.

Konsep ini jelas mempengaruhi makna penting gagasan tentang kedaulatan batas-batas wilayah nasional dan interaksi pemerintah suatu negara di dalam sistem dunia. Karena setiap negara begitu mudah disusupi dan begitu terbuka pengaruh dari luar, akibatnya politik dalam negeri tidak bisa dibedakan dari politik internasional. Pola hubungan penetrasi dan kaitan-kaitan baru ini melibatkan partisipasi besar-besaran dari jenis aktor non-negara, terutama organisasi non-pemerintah domestik maupun internasional ini ditunjukkan di dalam beberapa gambar di bawah ini.

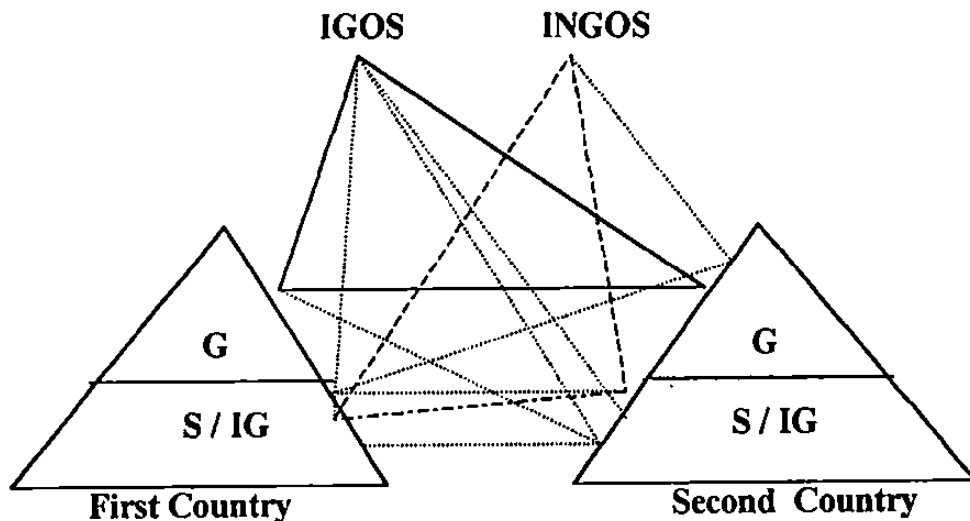
Salah satu ciri pokok hubungan transnasiona ialah adanya berbagai jenis interaksi yang *membay-pass* pemerintah negara-negara dan yang secara langsung mempengaruhi lingkungan dalam negeri pemerintah-pemerintah

<sup>8</sup> Richard Falk, *Transnasiona: Aktor-aktor non-negara*, itu ialah

lebih penting dari pada yang digambarkan oleh model *realis* atau *state centris*. Aktor-aktor ini bisa berwujud kelompok-kelompok suku, etnis atau separatis di dalam negara, berbagai kelompok kepentingan ekonomi dan perusahaan-perusahaan multinasional dan bahkan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah.

Gambar berikut akan memberikan penjelasan yang sistematis dan nyata

**Gambar 1.1.1 : Model Hubungan Transnasional**



Sumber : Adaptasi dari R.O. Keohane dan J.S. Nye, *Transnasional Relations and World Politics* (Harvard UP, 1997), dikutip dari buku *Teori dan*

Keterangan :

G : Government (*Pemerintah*)

IGOS : International Government And State Organitations  
(*Organisasi Pemerintah*)

INGOS : International Non Government And State Organitations  
(*Organisasi Non Pemerintah*)

S / IG : Society /Interest Group (*Masyarakat atau Kelompok  
Kepentingan*)

———— : Interaksi Antar Pemerintah

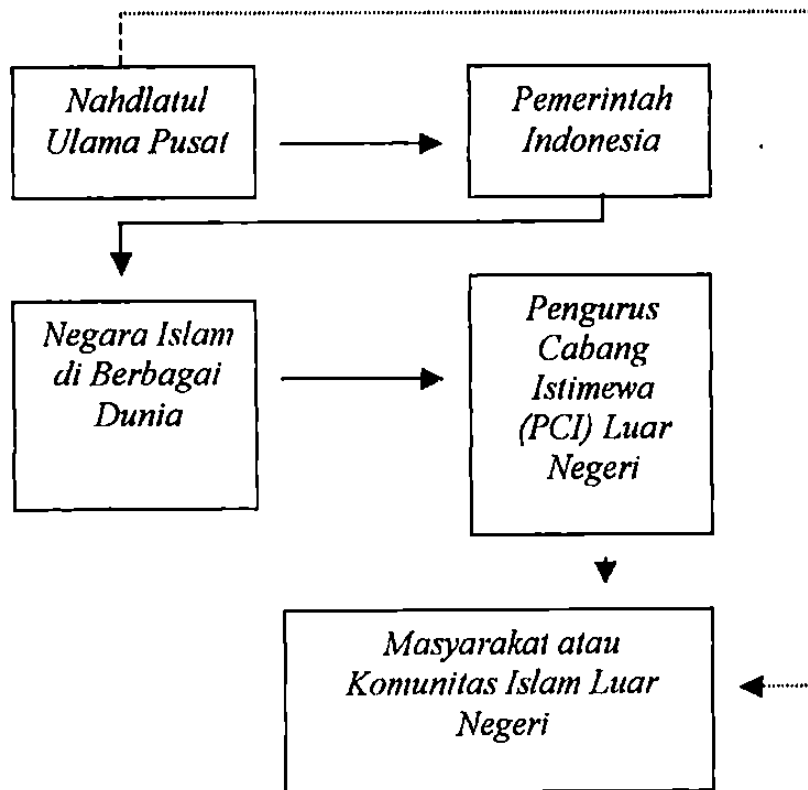
----- : Interaksi Domestik

----- : Hubungan Transnasional.

Aplikasi Konsep ini melalui gambar diatas merupakan penjelasan bahwa dalam perkembangannya organisasi transnasional cenderung melampaui batas-batas kenegaraan tanpa peran serta Pemerintah, namun di lain pihak Pemerintah melalui IGOS dapat mengcover organisasi transnasional non Pemerintah. Dengan kata lain keberadaan organisasi transnasional dapat menjadi perpanjangan tangan atas masyarakat atau kelompok kepentingan di suatu negara yang menghubungkan negara lainnya namun keberadaannya tidaklah semapan dan seeksis organisasi Pemerintah karena cakupan yang lebih luas yang mewakili masyarakat sekaligus negara, sedangkan organisasi non Pemerintah hanya

menjabarkan konsep diatas tersebut, penulis dituntut untuk dapat menerapkan hasil teori yang telah digunakan, sehingga teori tersebut dapat dipastikan secara langsung.

**Gambar Aplikasi Perkembangan NU Sebagai Aktor Transnasional**



Dalam perkembangannya organisasi Nahdlatul Ulama (NU) berkibrah di luar negeri melalui Pengurus Cabang Istimewa (PCI) yang tersebar di berbagai negara dunia, kiprah PCI dapat secara langsung menuju masyarakat Islam di luar negeri namun juga dapat berkembang melalui Pemerintah

yang berkompeten antara lain Departemen Agama masing-masing negara serta kedutaan-kedutaan di negara setempat.

Sejak awal berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia pada tahun 1926 hingga sekarang, Nahdlatul Ulama sudah banyak mengalami perubahan dalam pergerakan organisasinya, dari organisasi masyarakat hingga menjadi partai politik masyarakat. Munculnya gerakan yang *membay-pass* pemerintah dan negara di dalam organisasi terbesar ini adalah berawal dari sejarah pendirinya . K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Abdullah Wahhab Abdullah dan K.H. Bisri Sansuri serta ulama lain yang melakukan proses belajarnya (*Tholabul Ilmi*) di Mekkah. Maka disinilah secara historis proses hubungan aktor transnasional terjadi.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Nahdlatul Ulama sebagai aktor pemerintahan hingga saat ini (tahun 2005) adalah :

1. Menghidupkan kembali gerakan pribuminisasi Islam, sebagaimana diwariskan oleh para Walisongo dan pendahulunya.
2. Memperlopori perjuangan kebebasan bermazhab di Mekkah, sehingga umat Islam sedunia bisa menjalankan ibadah sesuai dengan mazhab masing-masing.
3. memelopori berdirinya MIAI (*Majelis Islam A'la Indonesia*) tahun 1937, yang kemudian ikut memperjuangkan tuntutan Indonesia berparlemen.
4. Memobilisasi perlawanan fisik terhadap kekuatan-kekuatan imperialisme

5. Berubah menjadi partai, yang pada pemilu tahun 1955 berhasil menempati urutan ketiga dalam perolehan suara secara nasional.
6. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) tahun 1965 yang diikuti oleh perwakilan dari 37 negara.
7. Mempelopori gerakan *Islam Cultural* dan penguatan *civil society* di Indonesia sepanjang dekade 90-an.

Dengan metode ini Nahdlatul Ulama mampu menembus dunia internasional, terutama negara-negara Islam dunia. Dalam penjelasan teori diatas, Nahdlatul Ulama dapat dikategorikan sebagai sebuah lembaga yang ada di dalam *Society I* yang menjalin hubungan baik dengan *Society II* sebagai pemerintah lain. Bahkan dapat pula masuk dalam naungan *Internasional non-Government Organization* (INGO), juga mampu menjalin hubungan dengan *Internasional Government Organization* (IGO). Hal ini secara riil dapat dibuktikan melalui kuantitas pejabat yang berasal dari Nahdlatul Ulama (NU) yang posisinya mampu menjadi *Key Person* dan tokoh penting bagi pembuat kebijakan di Indonesia, sehingga nilai-nilai Nahdlatul Ulama mampu berperan sebagai IGOS sekaligus INGOS.

Dalam konteks internasional, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki cabang di beberapa negara, seperti di Malaysia, Mesir dan lain sebagainya. Hubungan Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia dengan berbagai cabang di negara lainnya



Dalam teori transnasional aktor non-negara mampu mempengaruhi politik dunia secara langsung, tidak hanya pengaruh atas nama bangsa. Juga, mereka menyatakan “*kekuasaan*” setiap aktor internasional tergantung pada isu atau situasi yang melingkupinya, isu-isu yang dimunculkan bukan semata-mata isu militer keamanan, tapi juga sudah digantikan oleh isu-isu ekonomi. Hubungan ekonomi internasional semakin peka terhadap ekonomi dalam negeri masing-masing, seperti inflasi, begitu juga sebaliknya, ekonomi dalam negeri semakin peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam ekonomi internasional. Pendukung *Transnasionalisme* menekankan hubungan antara politik internasional dan ekonomi internasional.<sup>9</sup>

#### **F. Hipotesa.**

Melalui kerangka dasar pemikiran di atas dapat ditarik hipotesa yaitu Nahdlatul Ulama mampu berperan sebagai aktor transnasional, hal ini terbukti dengan :

1. Memiliki Pengurus Cabang Istimewa (PCI) di berbagai negara.
2. Memiliki hubungan dengan negara-negara Islam di berbagai negara.
3. Memiliki hubungan dengan Organisasi Non Pemerintah (INGOS) dan Organisasi Pemerintah (IGOS).
4. Memiliki hubungan dengan kelompok kepentingan (*interest group*) di beberapa negara Islam.

## **G. Metode Pengumpulan Data.**

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan data-data yang dipertanggungjawabkan, yang diperoleh dari metode penelitian pustaka. Dengan demikian data yang diperoleh adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai buku, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dan website internet dan berbagai pustaka lainnya. Meskipun data yang diberikan adalah data sekunder, akan tetapi penulis berusaha untuk memberikan gambaran yang obyektif tentang peranan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai aktor Transnasional.

## **H. Jangkauan Penelitian.**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi penulisan pada rentang tahun 1990-2005, dipilih tahun ini karena perkembangan Nahdlatul Ulama (NU) di luar negeri memuat berbagai fenomena dan dinamika yang menarik. Jangkauan di luar rentang tahun tersebut sedikit dibahas selama masih ada keterkaitan dan relevan.

## **I Sistematika Penulisan.**

Di dalam penulisan skripsi ini secara keseluruhan dapat dibagi menjadi empat bab sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi tentang alasan pemilihan judul, tujuan

dasar teoritik, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

## **BAB II DINAMIKA NAHDLATUL ULAMA (NU) SEJAK AWAL BERDIRINYA ORGANISASI HINGGA TANTANGAN DI ERA GLOBALISASI**

Bab ini berisikan tentang gambaran umum tentang sejarah perjalanan Nahdlatul Ulama (NU), asal usul serta perkembangannya, lembaga-lembaga organisasinya, semasa pendiri Nahdlatul Ulama (NU), seperti K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Abdullah Wahhab Abdullah dan K.H. Bisri Sansuri serta ulama lainnya. Hingga tantangan yang dihadapi di masa era globalisasi

## **BAB III UPAYA NADHLATUL ULAMA (NU) MENJAGA HUBUNGAN LUAR NEGERI SEBAGAI AKTOR TRANSNASIONAL**

Bab ini membahas tentang upaya-upaya apa saja yang dilakukan Nahdlatul Ulama (NU) dalam menjalin hubungan internasional, dan hubungan Nahdlatul Ulama dengan organisasi internasional. Dalam interaksi aktor transnasional nantinya akan melibatkan partiipasi organisasi Non-Government secara besar-besaran. Nahdlatul Ulama (NU) dengan cabang-cabangnya di berbagai

Cabang Istimewa yang mencakup berbagai agenda yang telah  
ditambah sebagai upaya memajukan Bangsa Indonesia dan Islam